

**KESIAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGEMBANGAN OPEN GOVERNMENT DATA**

(Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan)

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**LAILATUL MUKARROMAH**

**NIM 20120520171**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

# **KESIAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OPEN GOVERNMENT DATA**

**Oleh: LAILATUL MUKARROMAH**

**20120520171**

Email: lailaella12@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pemerintah yang demokratis harus diwujudkan dengan adanya transparansi (keterbukaan). Transparansi direalisasikan dengan adanya informasi kepada publik dari berbagai aspek yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan disahkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008 menuntut pemerintah untuk lebih terbuka lagi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membuka data kepada publik. Dalam PERKI nomor 1 tahun 2010 menyatakan bahwa setiap badan publik harus memiliki setidaknya situs website sebagai media dalam pengembangan open government data. Open government data dapat mencegah terjadinya korupsi di daerah karena diawasi langsung oleh masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan open government data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan sumber informan yaitu pegawai bidang kominfo, bagian humas, organisasi dan kepegawaian, bagian hukum sekretariat daerah, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya memberikan sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu di uji keabsahannya menggunakan validitas, reliabilitas, dan triangulasi selanjutnya analisis data menggunakan indeks yang kemudian dideskripsikan.

Hasil dari penelitian menunjukkan nilai indeks pada masing-masing variabel. Pada variabel organizational nilai indeks 3,615 dengan kategori baik, variabel information dengan nilai rata-rata indeks 3,89 kategori baik. Selanjutnya variabel people dengan nilai indeks 3,612 kategori baik, variabel acces network 3,72 dengan kategori baik, dan variabel financial resources dengan nilai indeks 3,65 dengan kategori baik.

Dari rata-rata kelima indeks menunjukkan nilai indeks sebesar 3,69. Berdasarkan kategori maka rata-rata indeks berada pada tingkatan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam open government data di Kabupaten Pekalongan dalam kategori siap.

Kata kunci: Open government data, Open data readiness, Pemerintah Daerah

# **LOCAL GOVERNMENT READINESS IN DEVELOPMENT ORGANIZATION OPEN GOVERNMENT DATA**

**Oleh: LAILATUL MUKARROMAH**

**20120520171**

Email: lailaella12@gmail.com

## **ABSTRACK**

A democratic government to be realized by the transparency (openness). Transparency is realized with the absence of information to the public on the various aspects that includes planning, implementation and monitoring. With the enactment of Freedom of Information Law No. 14 of 2008 requires the government to be more open, there is no reason for the government not to release the data to the public. Within PERKI number 1 of 2010 states that every public body should have at least the web site as media in the development of open government data. Open government can prevent corruption of data in the area for supervised directly by the public. The problems of this research is how the readiness of Pekalongan government.

This research is a descriptive study, with a source informants Kominfo field employees, the public relations department, organization and staffing, part of the regional secretariat of law, and Pekalongan Regency society deemed to know and reliably provide the data source. The data collection techniques used were interviews, questionnaires, observation, and documentation. Before analyzed, the data must first be tested validity using validity, reliability, and subsequent triangulation data analysis using indexes which are then described.

The results show the value of the index on each variable. At the organizational variable index value of 3,615 with good categories, the variable information with the average value of the index 3,89kategori well. The next variable index value of 3.612 people with good category, variable 3.72 acces network with good category, and financial resources with a variable index value of 3.65 with good categories.

From an average of five index shows a score of 3.69. Based on the category, the average index is at a good level. So it can be concluded that the readiness of the organization of local government in open government data is in Pekalongan in category ready.

**Keywords: Open Government Data, Open Data readiness, Local Government**

**Latar belakang** penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintahan yang demokratis harus diwujudkan dengan adanya transparansi (keterbukaan). Pendapat tersebut senada dengan Purwanto B.T, Sunardi (2010) menyatakan pemerintahan yang demokratis harus mengutamakan keterbukaan dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga rakyat dapat mengerti dan mengetahui semua kebijakan yang diperuntukkan baginya.

Transparansi direalisasikan dengan adanya informasi kepada publik dari berbagai aspek yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan. Dengan disahkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan semakin banyaknya penggunaan internet mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka lagi.

Masyarakat berhak untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan internet, media cetak maupun informasi secara langsung. Pemerintah Indonesia melalui persiden RI mengungkapkan bahwa publik berhak mengetahui informasi pemerintahan agar terciptanya open government.

Pada pasal 20 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 dengan jelas menyatakan bahwa situs web merupakan media layanan informasi data yang wajib dimiliki oleh badan publik. Situs web merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan open government data, agar masyarakat dengan mudah

dapat mengakses data pemerintahan serta ikut berpartisipasi dalam pengembangannya.

Dalam kancah internasional, Indonesia mendapatkan peringkat 52 dari 77 negara yang menerapkan open government data. Bahkan Indonesia tergabung dalam 8 negara pendiri open government partnership (OGP).

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011, Jawa Tengah merupakan urutan ke tiga dalam penerapan regulasi dalam keterbukaan informasi data melalui situs web. Pemerintah daerah Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan mandat untuk open data kepada publik. Sebagian besar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah mulai membentuk PPID untuk mengembangkan open government data.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah Jawa Tengah yang menerapkan open government data melalui media online. Melalui situs web **www.pekalongankab.go.id** masyarakat bebas mengakses informasi dan data seputar Kabupaten Pekalongan. Web tersebut merupakan salah satu web resmi pemerintah daerah yang masih aktif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berupaya mengembangkan open government data kepada publik melalui Portal Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses melalui **www.ppidgekalongankab.go.id**. Menurut data dari kementerian komunikasi dan informatika tahun 2014, kabupaten pekalongan

menempati urutan ke 18 dari 27 kabupaten/kota dalam penerapan open government di Jawa Tengah, dengan kategori kurang.

Pentingnya open government data untuk masyarakat, peneliti sangat tertarik untuk meneliti open government data di Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan open government data secara cepat, mudah, dan sederhana.

Dari penjelasan diatas maka **kerangka teori** yang di ambil adalah Demokrasi, Pemerintah Daerah, Open government data, Open government data readiness.

**Definisi konseptual** yang digunakan yaitu Pemerintah Daerah, Open government data, open government data readiness yang masing-masing dijelaskan berdasarkan pemahaman penulis. **Definisi operasional** yang digunakan yaitu variabel organizational, information, people, acces network, dan financial resources.

**Metode penelitian** yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan data kuantitatif dengan lokasi di Kabupaten Pekalongan. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik, yaitu: wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Sebelum data dianalisa terlebih dahulu dilakukan pengujian data menggunakan validitas,

reliabilitas, dan triangulasi sehingga data yang digunakan benar-benar valid.

**Hasil penelitian** menunjukkan penyebaran dan tingkat pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 80 kuesioner, yang kemudian dari 80 kuesioner disebar kembali sebanyak 65 kuesioner atau 81%. Berdasar 81% kuesioner yang kembali 5 kuesioner dianggap tidak memenuhi syarat sehingga kuesioner yang diolah sebanyak 60 kuesioner atau 75%.

**Hasil pengujian keabsahan data** dengan validitas product moment, menyatakan bahwa semua nilai  $r$  hitung lebih dari  $r$  tabel (0,254) sehingga semua pertanyaan dari masing-masing variabel dinyatakan valid. Pengujian selanjutnya menggunakan reliabilitas alpha cronbach semua nilai  $\alpha$  lebih besar dari angka kritis reliabilitas, sehingga semua pertanyaan dalam satu variabel dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Setiap badan publik di Kabupaten Pekalongan wajib mengumumkan informasi dengan tiga hal, yaitu: secara berkala, secara serta merta, dan menyampaikan informasi wajib setiap saat. Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang pada konsekuensi yang timbul apabila

suatu informasi diberikan kepada publik. Informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan data dan informasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan saat ini sudah cukup maksimal. Keterbukaan data tersebut dikatakan cukup berhasil terbukti dengan diterimanya penghargaan dari komisi informasi pada tanggal 4 Desember 2015 lalu. Penghargaan tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terbaik se-Jawa Tengah dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik Tahun 2015. Kabupaten Pekalongan mendapatkan peringkat ke 9 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dibalik capaian tersebut ada semakin banyaknya tantangan dibidang komunikasi dan informatika yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu: meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan sarana dan prasarana, menyediakan sub domain masing-masing SKPD, memperbaiki koneksi jaringan serta memberikan sosialisasi pada masyarakat.

Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi melalui wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap indikator-indikator dengan *Structural Equation Modeling (Full Model of Structural Equation Modeling)*. **Analisis** ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis indeks, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item



pertanyaan yang diajukan. Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 5.

Melalui angka indeks tersebut akan diketahui sejauh mana derajat persepsi responden atas variabel-variabel yang menjadi indikator dalam penelitian. Rentang jawaban dari pengisian dimensi pertanyaan setiap variabel yang diteliti, ditentukan dengan kriteria yang berkisar antara nilai terendah sampai nilai tertinggi.

Berdasarkan kriteria – kriteria di atas, ditentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **a. Organizaational**

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah kabupaten pekalongan dalam pengembangan *open government data* dilihat dari variabel organisasional secara keseluruhan dinyatakan siap dengan total jawaban siap (skor 4) pada 18 pertanyaan variabel organisasional. Rata-rata indeks skor jawaban variabel organisasional sebesar 3,615. Berdasarkan kategori indeks, maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa kesiapan organisasional dipersepsikan secara positif oleh responden.

#### **b. Information**

Kesiapan organisasi pemerintah daerah yang diukur dengan variabel information menunjukkan bahwa sebagian besar responden

dinyatakan siap dengan tanggapan **siap** (skor 4) pada 8 pertanyaan-pertanyaan variabel information. Rata-rata indeks skor jawaban variabel information sebesar 3,89. Berdasarkan kategori indeks skor, maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa kesiapan information dipersepsikan bahwa informasi dinilai positif oleh responden.

### **c. People**

Kesiapan Organisasi Pemerintah Daerah yang diukur dengan variabel People dapat diketahui bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah kabupaten pekalongan dalam pengembangan *open government data* dilihat dari variabel people secara keseluruhan dinyatakan siap dengan total jawaban siap (skor 4) terhadap 10 pertanyaan variabel people. Rata-rata indeks skor jawaban variabel people sebesar 3,61. Berdasarkan kategori indeks, maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa kesiapan people dipersepsikan bahwa SDM di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sudah memiliki kompetensi yang baik menurut responden.

### **d. Acces network**

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah kabupaten pekalongan dalam pengembangan *open government data* dilihat dari variabel acces network secara keseluruhan dinyatakan siap dengan total jawaban siap (skor 4) terhadap 15

pertanyaan variabel *aces network*. Rata-rata indeks skor jawaban variabel *aces networkl* sebesar 3,72. Berdasarkan kategori indeks, maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa akses jaringan tidak mengalami masalah serius.

#### **e. Financial Resources**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah kabupaten pekalongan dalam pengembangan *open government data* dilihat dari variabel *financial resources* secara keseluruhan dinyatakan siap dengan total jawaban siap (skor 4) terhadap 9 pertanyaan variabel *financial resources*. Rata-rata indeks skor jawaban variabel *financial resources* sebesar 3,65. Berdasarkan kategori indeks, maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa perencanaan dana sudah terkonsep dengan baik.

**Kesimpulan** hasil analisis indeks penilaian dari keseluruhan variabel Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan siap dalam pengembangan *open government data* dengan rata rata indeks 3,69. Berdasarkan kategori maka rata-rata berada pada tingkatan baik. Dimana temuan penelitian atas penilaian responden didukung hasil wawancara, dengan variabel *organizational, information, people, aces network, dan financial resources*. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sudah siap dalam mengembangkan *open government data*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesiapan Organisasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan *Open Government Data* di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Setidaknya ada satu tenaga ahli di bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi PPID dan setiap badan publik untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang teknologi.
2. Bagi pegawai bidang komunikasi dan informatika, dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus mewajibkan badan publik untuk memiliki subdomain sendiri, sehingga lebih terstruktur dan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari data.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan tentang penggunaan media elektronik, sehingga kesenjangan kemampuan dapat berkurang.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dapat menambah jaringan internet di daerah pedesaan yang tidak terjangkau dari pemerintahan, sehingga keterbukaan data dan akses internet merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Syafii, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT.Refika Aditama

### PERATURAN-PERATURAN:

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### JURNAL – JURNAL:

Abdillah, Khairul. 2012. *Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Fahrozi, Andi. 2009. *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Gayto Hakka, Alfansyie. 2015. *Analisis Kualitas dan Efektivitas Electronic Government Sebagai Media Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Hidayat, Achmad.2010. *Efektivitas e- government dalam pengelolaan tata pemerintahan yang trransapran dan partisipatif* . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Hikmawati, Nima. 2014. *Pemanfaatan Website Sebagai Sarana Pengelolaan Tanggapan dan Keluhan Masyarakat di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Prakoso, Velandani. 2015. *Demokratisasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Sadana. 2011. *Implementasi good governance dalam penyediaan public service yang efektif di kabupaten Rokan HILIR tahun 2011*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

Safitri, Diah. 2008. *Peran Badan i daerah pemkot yogyakarta dalam relokasi pkl pasar pekuncen tahun 2007*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

#### **SUMBER LAIN:**

Alonso, J. M., Boyera, S., Grewal, A., Iglesias, C., & Pawelke, A. (2013). *Open Government Data: Readiness Assessment Indonesia*. Diakses melalui [webfoundation.org](http://webfoundation.org) pada tanggal 9 November 2015 pukul 21.00 WIB

Davies, tim. 2014. *Open Data in Developing Countries*. Diakses melalui [www.opendataresearch.org/emergingimpacts](http://www.opendataresearch.org/emergingimpacts) Pada tanggal 7 November 2015 Pukul 22.00 WIB

Global report. 2013. *Open Data Barometer*. Diakses melalui [opendataresearch.org](http://opendataresearch.org) Pada tanggal 7 November 2015 Pukul 22.00 WIB

Huyuningsih, Annisa Farida. 2014. *Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Data Spasial Di Pemerintah Kabupaten/Kota Menggunakan Kuesioner Evaluasi Diri dan Technolgy Acceptance Model*. Tesis Pascasarjana Geometika UGM.

[Jatengprov.go.id](http://Jatengprov.go.id) Diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB

M. L. Smith and K. M. A. Reilly. 2013. *Open Development: Networked Innovations in International Development*. Diakses Melalui [idlbnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52348/1/IDL-52348.pdf](http://idlbnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52348/1/IDL-52348.pdf) Pada tanggal 9 November 2015 Pukul 21.00 WIB

[Komisiinformasi.go.id/category/view/kerjasama](http://Komisiinformasi.go.id/category/view/kerjasama) Diakses pada tanggal 10 November 2015 pukul 21.00 WIB

Kusuma, Riris setyawati. 2013. *Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual*. Jember:Fakultas Ekonomi Universitas Jember

No name. *Prinsip open government data*. Diakses melalui Opengovdata.org Pada Tanggal 27 Oktober 2015 Pukul 11.15 WIB

No name.2012.*Laporan independen Open Government Partnership (OGP) di Indonesia* Diakses melalui antikorupsi.org/id/content/laporan-independen-implementasi-open-government-partnership-ogp-di-indonesia-2012 Pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 20.00 WIB

No name.2012. *Open Government Indonesia : Era Baru Keterbukaan Pemerintah*. Diakses melalui slideshare.net/cokyfauzialfi/gsar-id-final-18-apr-smaller pada tanggal 22 Oktober 2015 Pukul 20.00 WIB

No name.*CASE STUDY: Open Government Indicators*. involve.org.uk/wpcontent/uploads/2011/04/2.10-Open-Government-Indicators.pdf Pada tanggal 23 Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB.

No name. *Buku Pegangan Open Data*. Diakses melalui sinergantara.or.id/wp-content/uploads/2013/11/I\_Open-Data-Handbook-Documentation.pdf pada tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 19.00 WIB.

No name. *Pengembangan Indeks Transparansi sebagai Standar Pengukur Transparansi Badan Publik Indonesia*. Diakses melalui journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal\_Ilmiyah\_ub/article/viewFile/1204/925. Pada Tanggal 26 Oktober 2015 pukul 17.00 WIB.

No name. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dan Open Government Partnership (OGP)*. Diakses melalui [http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GSAR%20ID%20FINAL%2018Apr\\_smaller.pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GSAR%20ID%20FINAL%2018Apr_smaller.pdf) pada tanggal 5 November 2015 pukul 20.00 WIB

Opengovernment.com Diakses pada tanggal 6 November 2015 pukul 22.30WIB

*Opengovernmentdata.org* Diakses Pada tanggal 22 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB

Opengovindonesia.org/en/ Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 22.00 WIB

Pekalongankab.go.id diakses pada tanggal 12 Desember 2015

Ppidpekalongankab.go.id Diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB

Ubaldi, Barbara.2013. *Open Government Data Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives*. Diakses melalui oecd-ilibrary.org/governance/open

government-data\_5k46bj4f03s7-en pada tanggal 23 Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB.

Yu, Harlan dan Robinson, David G. 2012. *The New Ambiguity of "Open Government"* Diakses melalui [korea.ssrn.com/delivery.php?ID...pdf](http://korea.ssrn.com/delivery.php?ID...pdf) pada tanggal 22 Oktober 2015 Pukul 20.00 WIB

Tauberer, Joshua. 2012. *Open Government Data*. Diakses melalui [opengovdata.io/2012/](http://opengovdata.io/2012/) Pada tanggal 27 Oktober 2015 Pukul 11.15 WIB